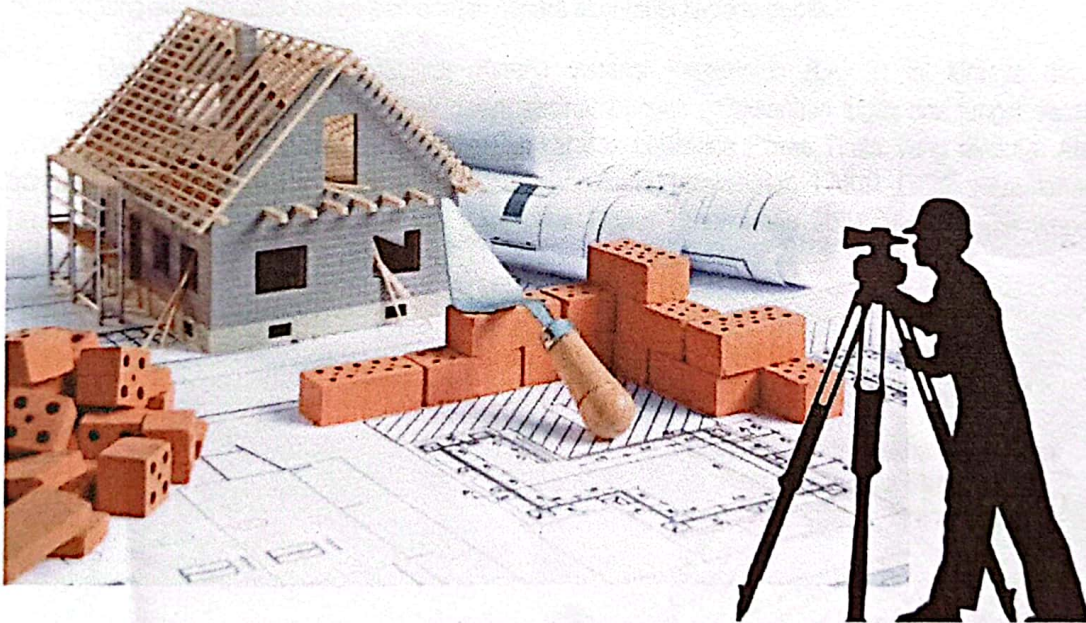




LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2021



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi pemerintah di tuntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang dalam penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2020. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan kerjasama semua pihak yang telah mendukung penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021, disampaikan limpah terima kasih.

Larantuka, 15 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 4 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP ini dilakukan berdasarkan dokumen realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2021 dengan menggunakan alat ukur dan evaluasi yang sistematis, obyektif, dan transparan dalam rangka kepastian dan akuntabilitas laporan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021 secara total melaksanakan 6 Program dan 25 Sub Kegiatan. Hasil pengukuran kinerja secara umum pada tahun 2021, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan detail Anggaran belanja sebesar Rp. 23.276.763.287,00.- untuk membiayai 8 Program dan 22 Sub Kegiatan, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.22,877.062.252,00.- atau prosentase capaian per 31 Desember 2021 adalah 98,28%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hasil pengukuran kinerja SKPD dalam skala ordinal ternilai sangat baik.

Larantuka, 15 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		iii
BAB I : Pendahuluan		1
A. Latar Belakang		1
B. Gambaran Singkat Organisasi		2
C. Dasar Hukum		4
D. Sistematika Penyusunan		5
BAB II : Perencanaan Kinerja		6
A. Perencanaan		6
B. Perjanjian Kinerja		18
C. Penetapan Kinerja		19
BAB III : Akuntabilitas Kinerja		21
A. Capaian Kinerja Organisasi		21
B. Realisasi Anggaran		28
BAB IV : Penutup		29
Lampiran – lampiran		31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya mengandung prinsip kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan. Keempat hal tersebut harus diwujudkan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanannya kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk berbagai organisasi baik organisasi pemerintahan maupun kemasyarakatan yang memiliki konstelasi adanya pola kemitraan yang nyata sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhirnya terwujudnya good governance.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas yang variatif untuk mendukung upaya pembangunan di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang ada.



B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Organisai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

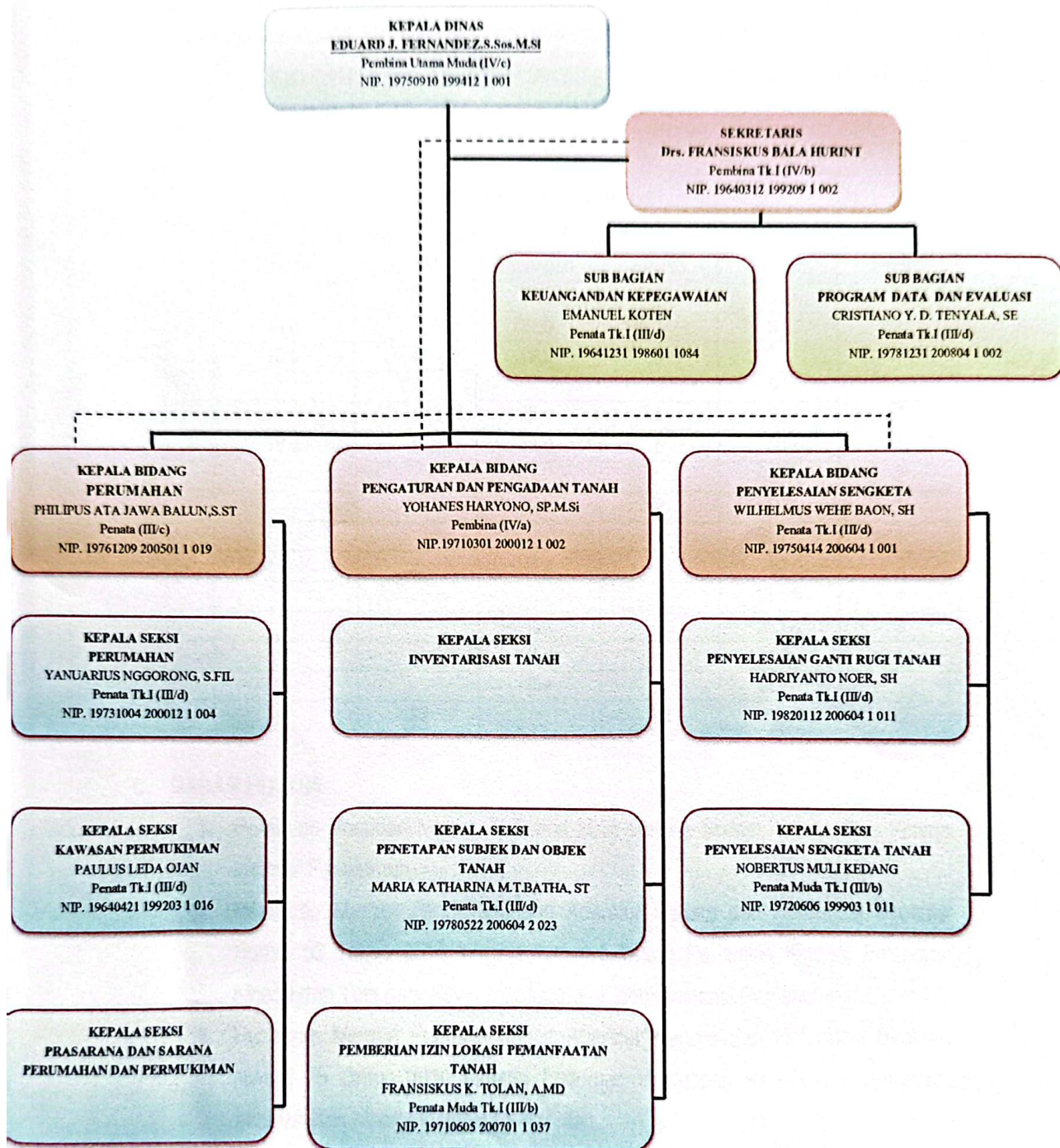
1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari sub bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, sub bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Pelaksana adalah bidang dan seksi yang terdiri dari :
 - a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- Seksi Perumahan
 - Seksi Kawasan Permukiman
 - Seksi Prasarana dan sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
- Seksi Inventarisasi Tanah
 - Seksi Penetapan Subjek dan Objek Tanah
 - Seksi Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
- Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Seksi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah No.87 Tahun 2016) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TA.2021



CATATAN :
 ————— GARIS KOMANDO
 - - - - - GARIS KOORDINASI

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah No.87 Tahun 2016)

Susunan Kepegawaian :

Data jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Flores Timur menurut eselon, pangkat / golongan dan pendidikan

:

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian

No	Eselonering		Pangkat		Pendidikan	
	Eselon	Jumlah	Golongan	Jumlah	Tingkat	Jumlah
1	II.b	1	IV.c	1	S2	1
2	III.a	1	IV.b	1	S1	1
3	III.b	4	IV.a	3	S2	1
					S1	2
			III.c	1	S1	1
4	IV.a	8	III.d	6	S1	4
					SLTA	2
			III.b	2	D3	1
					SLTA	1
5	Non eselon	8	III.a	3	S1	2
					SLTA	1
			II.d	3	SLTA	3
			II.c	1	D3	1
			II.a	1	SLTP	1
		22		22		22

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur .

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran singkat Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Penyusunan

II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Penetapan Kinerja

III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

IV Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Rencana Strategis

Rencana strategis organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022. Visi misi Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

- a. Visi : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu.
- b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang akan dicapai melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada periode rencana strategi / Renstra Tahun 2018– 2022 sebagai berikut :
 - 1) Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good goverment
 - 2) Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan
 - 3) Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Tujuan dan Sasaran

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
- b. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas
- c. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan Fasilitas Publik
- d. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
- e. Terwujudnya inventarisasi masalah tanah di wilayah kabupaten

Sasaran :

- a. Meningkatnya pelayanan akan prasarana jalan dan Jembatan perdesaan
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan
- c. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan Fasilitas Publik
- d. Terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
- e. Terdatanya inventarisasi masalah tanah di wilayah kabupaten

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Keberadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan

pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun pertama sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
 - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
 - c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur belum optimal.
 - d. Data dan informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum optimal.
 - e. Peran aktif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat,

- b. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung
 - c. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
 - d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - e. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
 - f. Sering terjadi banjir karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,
 - g. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.
3. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah dan Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
- a. Minimnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang ada, baik aparatur pemerintah Daerah maupun masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah
 - b. Terbatasnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan
 - c. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah dan hak ulayat

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka langkah – langkah indikatif dan arah tindakan yang menjadi pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama periode Renstra tahun 2018 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

a. Strategi dan Kebijakan :

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017 – 2022.

RUMUSAN PERNYATAAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD DALAM 5 TAHUN MENDATANG

VISI : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu.

Misi : 1. Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good government

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 2. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Pengembangan kemampuan dan Profesionalisme aparatur 4. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai bidang tugasnya 4. Meningkatkan hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyediaan jasa administrasi perkantoran - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Penyelenggaraan Bimtek dan pelatihan formal 4. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran 2. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 4. Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi : 2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan			
1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas 2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan permukiman yang berkualitas dan produktif	1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas 2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan permukiman yang berkualitas dan produktif	1. Penyediaan rumah layak huni 2. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman 3. Penyediaan prasarana, sarana permukiman	1. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi MBR 2. Meningkatkan akses air bersih masyarakat layak 3. Meningkatkan akses jalan, jembatan listrik

Misi : 3. Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan			
Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan	1. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah	1. Penegakan status hukum tanah 2. Fasilitasi penyelesaian konflik, penyuluhan hukum pertanahan dan Penyusunan Perda tentang pertanahan	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang le pertanahan
	2. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan 3. Terpenuhiya kebutuhan lahan untuk pembangunan	3. Meningkatkan luas lahan milik pemerintah	2. Penyuluhan Hukum dan penyusu Perda tentang pertanahan 3. Pembebasan lahan

b. Program dan Kegiatan :

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program / kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepeuluh) Ha

Sub Kegiatan :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah/Kota
- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6) PROGRAM REDRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Kegiatan : Penetapan Subjek dan Objek, Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

b. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran. Adapun rencana kerja anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 adalah :

URAIAN		Pagu Dana (Rp)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.210.000
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.881.556.296
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.687.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.705.992
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.852.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.854.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.620.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.626.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.485.200
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.092.465
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.925.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	690.201.200
3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10.232.887
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah/Kota	28.411.800
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.118.800

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.888.985.100
6. PROGRAM REDRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
<i>Penetapan Subjek dan Objek, Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	29.076.400

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah pernyataan keseriusan sebuah instansi pelaksana program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja dengan Bupati Flores Timur. Substansi daripada perjanjian kinerja ini mempunyai muatan tanggung jawab instansi /

lembaga / unit kerja / satuan kerja untuk dapat mencapai target kinerja sesuai perencanaan. Proses penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta penjabaran program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan OPD pada tahun yang bersangkutan dengan dukungan sejumlah anggaran yang dirinci secara detail pada masing – masing kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai bukti keseriusan pelaksanaan tugas oleh OPD penyelenggara program dan kegiatan maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati Flores Timur dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dalam lampiran LAKIP ini. **(terlampir)**

C. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranyamanajemen organisasi yang baik. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi pemegang kendali manajemen organisasi dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol apakah organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen penetapan rencana kinerja tahunan. Pada tahun 2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan 6 Program, 10 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang tersebar di tiga bidang dan dua sub bagian pada sekretariat dinas. Program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2021 disertakan dengan dukungan

anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud agar dapat terealisasi secara baik pada tahun 2021. Rincian jumlah program dan kegiatan tahun 2021 dapat terekam dalam Tabel Penetapan Kinerja **(terlampir)**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan /kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Renstra OPD dan Penetapan Kinerja 2021.

Sasaran strategis

Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai.

1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
4. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
5. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan
6. Terpenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berusaha untuk memanfaatkan sumber daya, anggaran dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur yang ada, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Analisis tingkat keberhasilan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan perbandingan pencapaian pada tahun sebelumnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis secara terperinci dijabarkan menurut misi organisasi dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Visi : *"Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu."*

Misi 1 : *Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good government*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good government	Tersedianya Aparatur yang berkualitas	Org	8	4	-	-	-

Analisis Capaian Kinerja terhadap tabel di atas :

Target jangka menengah yang termuat dalam dokumen rencana strategis OPD untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal adalah 4 orang. Target pada tahun 2018 jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan 8 orang, realisasi 8 orang atau prosentase capaian 100%. Tahun 2019 di targetkan 4 orang dan realisasi 4 Orang prosentase capaian 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan beberapa faktor antara lain faktor umum dari dinas itu sendiri yaitu adanya semangat untuk melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan pembangunan di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Faktor khusus datang dari pribadi aparatur yakni adanya kesadaran aparatur akan peningkatan SDM sesuai dengan tuntutan pekerjaan agar hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dapat tercapai. Sementara peningkatan kualitas SDM Aparatur yang berkualitas tahun 2021 tidak di dilakukan kegiatannya karena tidak di anggarkan.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan	Terlaksananya kegiatan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Unit	466	58	195	46	23,5%
Meningkatnya prasarana perumahan	Terfasilitasinya rencana pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)	Lokasi	6	-	-	-	-
Tersedianya air minum dan sanitasi	1. Meningkatkan jumlah Pelayanan air bersih	SR	376	1092	1768	1768	100%
	2. Meningkatkan jumlah pelayanan limbah domestik	Unit	439	552	580	580	100%
Terciptanya kawasan permukiman yang berkualitas dan produktif.	1. Meningkatkan volume konstruksi Jalan Lingkungan yang terbangun	Km	0,855 Km	680 m	0,250 km	0,5 km	20%
	2. Meningkatkan konstruksi Talud Pengaman Lingkungan yang terbangun	Lokasi	4	1	-	-	-

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu merupakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target pembangunan BSPS pada Tahun 2021 adalah 195 unit rumah namun realisasinya 46 Unit dari sumber dana APBD II dengan dukungan anggaran APBD II sebesar Rp. 690.201.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 688.201.200.- atau capaiannya sebesar 99,71%
2. Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka penyediaan Prasarana sarana dan Utilitas Umum Perumahan Meliputi Sub Kegiatan Peningkatana Pelayanan Limbah Domestik Sebanyak 580 Unit Septik, Peningkatan Pelayanan Air Bersih Sebanyak 1.768 Sambungan Rumah dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman Di Desa Karing Lamalouk (Kelebe), Lamalota-Nisakarang dan Kelurahan Sarotari Tengah Sepanjang 250m Namun 2 lokasi anggarannya terpotong untuk Covid 19 dengan anggaran Keseluruhan Sebesar 10.110.646.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,104,414,547 atau 99,94 %.

Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengurangi dan Meminimalisir konflik pertanahan	1.inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	Desa	1	4 Desa	6 Kasus	6 Kasus	100%
	1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah	kasus			6 kasus	6 kasus	100%

	Kab/Kota						
Bertambahnya Luas Tanah Pemda yang Dibebaskan	1. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Desa	4	5 Kec.	6 Bidang	6 Bidang	100%
	2. Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota	Buku	-	-	5 Bidang	5 Bidang	100%

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota, sasaran pencapaian target pada tahun 2021 adalah Meminimalisir Konflik Pertanahan Publik di Kabupaten Flores Timur. Jumlah Kecamatan yang dapat difasilitasi yaitu Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Titehena, dan Kecamatan Tanjung Bunga.

Ketersediaan pagu anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah Rp. 28.411.800,00,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 28.411.800,00,- atau 100 %.

2. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota. Kegiatan ini meliputi Mediasi Sengketa Pertanahan yang di laksanakan Tersebar Kecamatan yang ada di Kab. Flores Timur. Pagu Anggaran yang

disiapkan sebesar Rp. 23.118.000,00- dengan Tingkat penyerapan anggaran mencapai Rp. 22.373.000,00,- atau sebesar 96,78%.

3. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, sasaran pencapaian target pada tahun 2021 adalah 6 Kecamatan/Kel. Jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pendaftaran Tanah adalah Rp. 9.987.305.100,00 di alokasikan untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota ke 6 Kecamatan/Kel yaitu kec. Ile Mandiri, Kec. Wotan Ulumado, Kec. Ilebolen, Kec. Adonara Timur dan Kec. Adonara Barat dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.930.609.732,00,- atau 99,43%.
4. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota . Jumlah pagu anggaran yang disediakan adalah Rp. 29.076.400,00,- di laksanakan di 5 kecamatan yang tersebar di kabupaten Flores Timur yaitu di Kec.Wotan Ulumado,Kec Ile Bura,Kec Adonara Barat, Kec Witihamu, dan Kecamatan Ile Mandiri dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 29.076.000,00,- atau 100%.

Capaian kinerja secara umum pada tahun 2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terhadap 8 Program dan 25 kegiatan yang relevan dengan 6 (enam) sasaran strategis organisasi adalah sebesar 97,15%. Hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator hasil dipilah menurut visi dan misi organisasi OPD seperti terlihat pada tabel di atas.

Prosentase pencapaian penyerapan anggaran secara umum atas semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021 mencapai 97,15 %.Hal ini mengindikasikan hasil pengukuran kinerja OPD ternilai sangat baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 telah diupayakan dilakukan secara optimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp.13.856.317.987,00, Dengan detail Realisasi Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp. 13.460.848.905 atau prosentase capaian 97,15%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2021 adalah Rp. 395.469.082,00,-. Penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2021. *(Lampiran 1)*

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LAKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2021 dinilai sangat baik apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2021, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalan dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun – tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan.

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 6 program, 10 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan baik program OPD maupun program urusan dengan 6 sasaran yang hendak dicapai.

- b. Pengukuran capaian kinerja dipetakan menurut visi dan misi organisasi serta 6 sasaran strategis organisasi yang relevan pada 25 Sub kegiatan dilaksanakan pada tahun 2021. *Capaian kinerja terukur sebesar 97,15% dalam skala ordinal penilaian, dinilai sangat baik.*
- c. Hasil dari program dan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai target.
- d. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya : faktor intervensi masyarakat, mekanisme proses, alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, faktor kualitas / ketersediaan SDM pengelola kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan juga belum memadai.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap dimensi. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi / evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, 15 Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KA
KAB. FLORES TIMUR,


EDUARD J. FERNANDEZ / S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

REALISASI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.210.000	24.202.000	100	8.000	
	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.272.830	1.629.712.346	85	290.560.484	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrtasi Keuangan	49.687.000	49.117.000	99	570.000	
	Administrtasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.705.992	3.655.000	99	50.992	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK dan Alat Kebersihan Yang Di Sediakan	17.852.500	17.852.500	100	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	17.854.000	17.706.000	99	148.000	
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1.500.000	1.140.000	76	360.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Facilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum kantor	15.000.000	15.000.000	100	-	
	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah	41.620.000	41.620.000	100	-	

Tabel Realisasi Anggaran 2021

PROGRAM / KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEGIATAN				TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	KET.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1,626,000	1,620,000	100		6,000	
Penyediaan Jas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	26,000,000	13,185,700	50.71		12,814,300	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343,735,200	320,434,400	93.22		23,300,800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Terpiliharnya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	22,092,465	20,149,780	91.21		1,942,685	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Terpiliharnya Bangunan Gedung Kantor	9,990,000	9,990,000	100		-	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya		Terpiliharnya Unit pertengkapan gedung kantor	2,925,000	2,925,000	100		-	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor / bangunan lainnya		Terpiliharnya Peralatan Gedung Kantor	3,000,000	2,964,900	98.83		35,100	
Program Kawasan Permukiman		Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumum dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha					-	
Program Pemukiman		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10,110,646,500	10,104,414,547	99.94		6,231,953	
Program Pemukiman		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum		Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	597,134,500	590,902,547	98.96		6,231,953	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Tanah Garapan		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/kota	28,411,800	28,411,800	100		-	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah Kab/kota	23,118,000	22,373,000	96.78		745,000	

Tabel Realisasi Anggaran 2021

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota						
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah Tanah Pemda yang Dibebeaskan	9,987,305,100	9,930,609,732	99	56,695,368	
Program Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						
	Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota	Jumlah Tanah Pemda yang difasilitasi	29,076,400	29,076,000	100	400	
J U M L A H			23,276,763,287	22,877,062,252	98.28	399,701,035	

Larantuka, 18 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur

Eduard J. Fernandez S. Sos, M. Si
EDUARD J. FERNANDEZ S. Sos, M. Si
Pembina Muda
NIP. 197509101994121001

Tabel Realisasi Anggaran 2021

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Komponen
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47	Jenis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350	Buku
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	480	Eksplar
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	900	Dos
		Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	Kali
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	725	Kali
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28	Orang
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	4	Unit
4		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	Gedung
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	2	Unit
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	15	Unit
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan	Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumulatif dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	195	RTLH
	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Kawasan Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		

6		Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	Terbangunnya Jalan dan Talud Lingkungan Permukiman	8	Lokasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	Mengurangi dan meminimalisir konflik pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
7		inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Tanah Pemda yang difasilitasi	6	Kasus
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Tanah Pemda yang dilakukan Mediasi	6	Kasus
	Terjaminnya kepastian Hukum Tanah	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk pembangunan Oleh			
8		Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah Tanah Pemda yang Dibebaskan	12	Bulan
	Terjaminnya kepastian Hukum Tanah	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan			
		Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah Tanah Pemda yang difasilitasi	28	Bidang

Kegiatan :		Anggaran :		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
		Rp		(%)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	24,210,000	24,202,000
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,954,604,241	1,920,272,830	1,629,712,346
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,217,000	49,687,000	49,117,000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3,705,992	Rp
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	22,857,000	Rp
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	23,810,000	Rp
7	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	1,500,000	Rp
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	15,000,000	Rp
9	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	41,620,000	Rp
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1,626,000	Rp
11	Penyediaan Jas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	26,000,000	Rp
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	374,314,000	Rp
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp	22,092,465	Rp
14	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp	9,990,000	Rp
15	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Rp	2,925,000	Rp
16	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Rp	3,000,000	Rp
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp	728,080,000	Rp
17	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	Rp	10,577,971,400	10,104,414,547
18	inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanian dalam 1 (Satu) daerah KabKota	Rp	45,625,000	Rp
19	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah KabKota	Rp	28,340,000	Rp
20	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan bantuan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah KabKota	Rp	12,024,429,700	Rp
21	Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) KabKota	Rp	41,330,000	Rp

JUMLAH	Rp	26,025,017,798	Rp	23,369,829,987	Rp	22,974,360,905	98.31
--------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	-------

Larantuka, 15 Januari 2022
Kepala Dinas Perumahan
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur

BUPATI FLORES TIMUR

ANTONIUS H. GEGE HADJON, ST

EDUARD J. FERNANDEZ S.Soa, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1967050-1993031014

Pendapatan Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Meningkatnya Pengembangan Capaian Laporan Kinerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30	Buku
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah	14	Bulan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Komponen
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	47	Jenis
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350	Buku
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	480	Ekslar
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900	Dos
		Fasilitas Kunjungan Tamu	150	Kali
		Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	725	Kali
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28	Orang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional	4	Unit
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	Gedung
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	2	Unit
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	15	Unit
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan	Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumum dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	195	RTLH
	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Kawasan Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
		Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	8	Lokasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
	Mengurangi dan meminimalisir konflik pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	6	Kasus
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	6	Kasus
	Terjaminnya kepastian Hukum Tanah	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk pembangunan Oleh		

		Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	12	Bulan
	Terjaminnya kepastian Hukum Tanah	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum		
		Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota	28	Bidang

Kegiatan :		Anggaran :		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi (%)
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	24,210,000	100
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,954,604,241	1,920,272,830	85
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,217,000	49,687,000	99
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	3,705,992	3,705,992	99
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,857,000	17,852,500	100
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,810,000	17,854,000	99
10	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,500,000	1,500,000	76
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	15,000,000	100
12	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	41,620,000	41,620,000	100
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,626,000	1,626,000	100
15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	26,000,000	26,000,000	51
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374,314,000	257,485,200	124

17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	22,092,465	22,092,465	20,149,780	91
19	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9,990,000	9,990,000	9,990,000	100
20	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	2,925,000	2,925,000	2,925,000	100
21	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	3,000,000	3,000,000	2,964,900	99

JUMLAH		Rp	2,578,261,698	Rp	2,414,820,987	Rp	2,171,274,626	89.91
--------	--	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-------

Larantuka, 15 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur

Sekretaris

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur

EDUARD J. FERNANDEZ S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 190412 1 001

Drs. FRANSISKUS BALAHURINT

Pembina

NIP. 19640312 199209 1 002

Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan	Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	195	RTUH
	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Kawasan Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
2		Kordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	8	Lokasi

Anggaran :				
Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
1	Rp	729,060,000	690,201,200	Rp 99.71
2	Rp	10,577,971,400	10,104,414,547	99.94
JUMLAH	Rp	11,307,031,400	10,800,847,700	Rp 99.92

Larantuka, 15 Januari 2022

Kepala Bidang Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanian
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
Kabupaten Flores Timur


PHILIPUS ATJAWA BALUN S ST
Penata
NIP. 19761209200501 1019

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanian
Kabupaten Flores Timur


EDUARD J. FERNANDEZ S Sos, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 198412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BIDANG PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terjaminnya kepastian Hukum Tanah	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		
		Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	3	Bulan
		Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota	3	Bidang

Kegiatan :				
Anggaran :				
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
1 Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	12,024,429,700	9,987,305,100	9,930,609,732	99.43
2 Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota	41,330,000	29,076,400	29,076,000	100.00

JUMLAH	Rp	12,065,759,700	Rp	10,016,381,500	Rp	9,959,685,732	99
--------	----	----------------	----	----------------	----	---------------	----

Larantuka, 15 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanian
Kabupaten Flores Timur

Kepala Bidang Pengaturan dan Pengadaan Tanah
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
Kabupaten Flores Timur

EDUARD J. FERNANDEZ S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750810 199402 1 001

YOHANES HARYONO, SP. M.Si
Pembina
NIP. 19710301 200012 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Mengurangi dan meminimalisir konflik pertanahan	Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan		
		inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	6	Kasus
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	6	Kasus

Kegiatan :		Anggaran :		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
1	inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanian dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	45,625,000	28,411,800	100,00
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	28,340,000	23,118,000	96,73
JUMLAH		73,965,000	51,529,800	98,55

Larantuka, 18 Januari 2022

Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur

WILHELMUS WAHEBAON, SH
Penata Tk. I
NIP. 19750414 200604 1 020

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanian
Kabupaten Flores Timur

EDUARDO J. FERNANDEZ S.Sos, M.S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001